

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka untuk mewujudkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu dilaksanakan pemberian bantuan sosial stimulan rumah layak huni.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No. 48 Tahun 1982; PP No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 77 Tahun 2020; PERDA KOTA BLITAR No. 2 Tahun 2025; PERWALI No. 67 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Jenis Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni, Data Calon Penerima Bantuan, Penerima Bantuan, Tata Cara Pemberian Bantuan, Perubahan Dan Pembatalan Penerima Bantuan, Tim Teknis, Tenaga Fasilitator Lapangan, Pengawasan Dan Pengendalian, Pendanaan, Larangan, Sanksi Administratif.
- CATATAN:
- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Juli 2026.
 - 21 Halaman.